



Media: Joglo Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Mei 2026

Halaman: 2

Sidak Daycare, Komisi D Siapkan Aturan Perketat Izin

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Komisi D DPRD Kota Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lembaga penitipan anak (daycare), Senin (11/5). Langkah itu diambil guna memastikan legalitas dan standar keamanan pengasuhan anak di wilayah tersebut. Hasilnya, legislator menemukan adanya daycare yang sudah beroperasi satu dekade namun belum mengantongi izin resmi.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini memimpin langsung peninjauan di dua lokasi utama, yakni TAA Al Fatimah dan Pustablume Daycare. Fokus sidak menyorot aspek perizinan, kelayakan sarana prasarana, Standard Operating Procedure (SOP), hingga kurikulum pengasuhan. Darini menegaskan, aspek legalitas adalah fondasi utama layanan publik, terlebih yang

menyangkut kelompok rentan seperti anak-anak. Menurutnya, kualitas pengasuhan yang baik harus berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum.

Pustablume Daycare secara pola asuh dan kurikulum sebenarnya sudah bagus. Sayangnya, ada kendala izin usaha meski sudah sepuluh tahun beroperasi. Kami dorong pengelola segera menindaklanjuti. Ini bukan sekadar administratif,

tapi jaminan keamanan bagi anak yang dititipkan," tegas Darini di sela peninjauan.

Kondisi kontras terlihat di TAA Al Fatimah. Pengelola di lokasi itu dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap legalitas dan tengah memproses perpanjangan izin untuk kali kedua. Dewan pun mengapresiasi kepatuhan tersebut dan meminta prosesnya segera

dirampungkan agar layanan tidak terganggu secara formal. Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi menyatakan, temuan lapangan itu bakal menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan bagi Pemkot Jogja.

Pihaknya menekankan pentingnya pengawasan ketat guna menghindari risiko malpraktik pengasuhan. "Hasil temuan ini akan kami

bawa ke rapat kerja untuk rekomendasi kepada eksekutif. Sinergi antara pengelola, dinas, dan legislatif penting demi ekosistem pengasuhan yang aman dan berstandar," ujar Solihul.

Sebagai langkah jangka panjang, Komisi D berencana mengkaji ulang regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwal). Langkah itu diambil untuk memperkuat

payung hukum sekaligus mempermudah pelaku usaha mengakses prosedur perizinan yang akuntabel.

Melalui penataan ini, diharapkan orang tua di Kota Jogja mendapatkan kepastian rasa aman. Penguatan regulasi juga menjadi upaya strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan optimal dan pemenuhan hak dasar generasi penerus. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005